

# Ecces

Economics, Social, and Development Studies

---

ANALISIS SEKTOR POTENSIAL DI WILAYAH *TELLUNGPOCCO'E*  
*Andi Samsir*

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN NELAYAN DI DESA AENG BATU-BATU  
KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR  
*Abdul Rahman dan Nuratul Awalia*

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL  
MELALUI PEMBENTUKAN KLASTER DI KABUPATEN SEMARANG  
*Silvera Sekar Wijayanti dan Darwanto*

PENGARUH PENDAPATAN PETANI PADI TERHADAP TINGKAT PENDIDIKAN  
ANAK DI KECAMATAN LAMASI TIMUR KABUPATEN LUWU  
*Juwinda Sardi dan Hasbiullah*

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN INDUSTRI MEUBEL TERHADAP  
PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA MAKASSAR PERIODE 2008-2013  
*Siska Liyana dan Abdul Wahab*

ANALISIS PENGARUH UTANG LUAR NEGERI (*FOREIGN DEBT*) DAN PENANAMAN  
MODAL ASING (PMA) TERHADAP NILAI PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)  
INDONESIA  
*Muflihul Khair dan Bahrul Ulum Rusydi*

ANALISIS PENGARUH TINGKAT INFLASI DAN JUMLAH UANG BEREDAR  
TERHADAP NILAI TUKAR RUPIAH DI INDONESIA  
*Marina dan Amiruddin K*

ANALISIS EFISIENSI KLASTER RUMPUT LAUT DI KABUPATEN BREBES  
*Mastur Mujib Ikhsani*

**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

# Ecces

Economics, Social, and Development Studies

---

ANALISIS SEKTOR POTENSIAL DI WILAYAH <i>TELLUNGPOCCO'E</i> <i>Andi Samsir</i>	1
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN NELAYAN DI DESA AENG BATU-BATU KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR <i>Abdul Rahman dan Nuratul Awal</i>	16
IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MELALUI PEMBENTUKAN KLASTER DI KABUPATEN SEMARANG <i>Silvera Sekar Wijayanti dan Darwanto</i>	35
PENGARUH PENDAPATAN PETANI PADI TERHADAP TINGKAT PENDIDIKAN ANAK DI KECAMATAN LAMASI TIMUR KABUPATEN LUWU <i>Juwinda Sardi dan Hasbiullah</i>	58
ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN INDUSTRI MEUBEL TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA MAKASSAR PERIODE 2008-2013 <i>Siska Liyana dan Abdul Wahab</i>	71
ANALISIS PENGARUH UTANG LUAR NEGERI ( <i>FOREIGN DEBT</i> ) DAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) TERHADAP NILAI PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) INDONESIA <i>Muflihul Khair dan Bahrul Ulum Rusydi</i>	82
ANALISIS PENGARUH TINGKAT INFLASI DAN JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP NILAI TUKAR RUPIAH DI INDONESIA <i>Marina dan Amiruddin K</i>	101
ANALISIS EFISIENSI KLASTER RUMPUT LAUT DI KABUPATEN BREBES <i>Mastur Mujib Ikhsani</i>	115

# ANALISIS SEKTOR POTENSIAL DI WILAYAH TELLUNGPOCCO'E

Andi Samsir<sup>1</sup>

## ABSTRAK

Desentralisasi pembangunan maupun fiscal tersebut perlu disikapi dengan serius oleh masing masing pemerintah daerah, tidak terkecuali di wilayah *Tellungpocco'e* (Kabupaten Bone, Soppeng, dan Wajo), melalui proses perencanaan dan penganggaran sesuai dengan apa yang menjadi visi misi pembangunan daerah yang menunjukkan arah dan cita cita masyarakat setempat. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh informasi tentang analisis sektor potensial di wilayah Tellungpocco'e. Jenis penelitian ini adalah *descriptive research* dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi dari berbagai instansi pemerintah diantaranya Badan Pusat Statistic Propinsi Sulawesi Selatan berupa data laju pertumbuhan dan tingkat pendapatan perkapita masing masing kabupaten pada tahun 2003-2013. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan *descriptive quantitative* dengan alat analisis yaitu tipologi Klassen. Dimana Analisis Tipologi Klassen. Berdasarkan hasil analisis dari masing masing kudaran mempunyai implikasi terhadap kebijakan pembangunan di wilayah Tellungpocco'e dimana penelitian ini menemukan bahwa sector sector yang dapat dikembangkan di masing masing kabupaten adalah sector pertanian dan bangunan di Kabupaten Bone, sector jasa jasa di Kabupaten Soppeng dan sector pertanian di Kabupaten Wajo dengan menetapkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah merupakan sasaran utama pembangunan daerah.

**Kata kunci:** Desentralisasi, Sektor Potensial, Pembangunan Daerah

## PENDAHULUAN

Pembangunan pada dasarnya melingkupi berbagai aspek kehidupan berbangsa, yaitu aspek ekonomi, politik, social, dan budaya serta pertahanan keamanan secara terarah, terencana, menyeluruh, dan terpadu serta berkelanjutan. Hal tersebut diarahkan pada upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar tahun 1945 aline keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

---

<sup>1</sup> Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan UNM Makassar  
Email: [syamsir\\_fe03unm@yahoo.co.id](mailto:syamsir_fe03unm@yahoo.co.id)

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut berbagai model strategi perencanaan pembangunan pernah diterapkan di Indonesia, diantaranya perencanaan rasional konferhensif pada masa orde baru dan perencanaan strategis di masa orde reformasi.

Dengan pemilihan model perencanaan yang tepat dianggap mampu memberikan dampak terhadap keberhasilan pembangunan di suatu negara. Pelaksanaan pembangunan yang diusung oleh orde baru merupakan sebuah konsep yang dikenal dengan istilah trilogi pembangunan yaitu stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan (Hadi dan Kusuma: 2012). Pendekatan yang bersifat sentralistik tersebut dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yaitu rata-rata sebesar 7 persen, bahkan pada tahun 1980 mencapai 9,9 persen, dianggap belum mampu menciptakan pemerataan (*trickle down effect*) di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Aritenang (2008) menunjukkan bahwa disparitas pembangunan yang parah masih terlihat di beberapa propinsi di Indonesia pada masa awal orde reformasi. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Januari 2001 pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan terjadinya perubahan yang menyangkut dua hal pokok, yaitu: *pertama*, pemerintah daerah memberikan kewenangan lebih besar dalam melakukan pengelolaan pembangunan (desentralisasi pembangunan). *Kedua*, pemerintah diberikan sumber keuangan baru dan kewenangan pengelolaan keuangan yang lebih besar (desentralisasi fiskal). Tujuan dan sasaran utama dari desentralisasi tersebut adalah agar pemerintah daerah dapat lebih diberdayakan dan dapat melakukan kreasi dan terobosan baru dalam rangka mendorong proses pembangunan di daerah masing-masing sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat yang bersangkutan.

Desentralisasi pembangunan maupun fiskal tersebut perlu disikapi dengan serius oleh masing masing pemerintah daerah, tidak terkecuali di wilayah *Tellungpocco'e* (Kabupaten Bone, Soppeng, dan Wajo), melalui proses perencanaan dan penganggaran sesuai dengan apa yang menjadi visi misi pembangunan daerah yang menunjukkan arah dan cita cita masyarakat setempat. C.P. Kindleberge, H.W. Singer dan Albert Hirschman (Jhingan, 2010; Perkin, et al, 2001) menyatakan bahwa tidak ada negara atau daerah yang memiliki modal dalam jumlah yang sangat besar untuk melakukan pembangunan di semua sector sehingga perencanaan pembangunan harus juga memperhatikan kemampuan

fiscal daerah yaitu investasi seharusnya dilakukan pada beberapa sektor atau industri yang telah terpilih agar hasilnya cepat berkembang, dan hasil tersebut dapat digunakan untuk membangun sektor-sektor yang lain. Melihat arah kebijakan pembangunan yang ada di wilayah *Tellungpocco'e*, belum terlihat adanya analisis potensi ekonomi secara relative untuk menggambarkan kondisi dan arah pembangunan di daerah tersebut. Oleh karena itu, Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh informasi tentang analisis sektor potensial di wilayah Tellungpocco'e.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Teori Harro-Domard merupakan peluasan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi nasional dan masalah penggunaan tenaga kerja. Berbeda halnya dengan Keynes yang berbicara pertumbuhan dalam jangka pendek, analisis Harrod-Domar bertujuan menutupi kelemahan analisis Keynes. Pada dasarnya, teori Harrod-Domar berusaha untuk menunjukkan syarat yang diperlukan agar pertumbuhan yang mantap (*steady growth*) merupakan pertumbuhan yang akan selalu menciptakan penggunaan sepenuhnya alat-alat modal akan selalu berlaku dalam perekonomian (Adisasmitha, 2013).

Istilah pembangunan seimbang (*balanced development*) diciptakan oleh Ragnar Nurkse (1960), tetapi teori tersebut pertama kali dikemukakan oleh Rosentein Rodam (1957), yang beranggapan bahwa melaksanakan industrialisasi di daerah yang kurang berkembang merupakan cara untuk menciptakan pembagian pendapatan yang lebih merata di daerah kurang berkembang dengan lebih cepat dari pada di daerah lebih kaya. Dalam pembangunan seimbang harus dilakukan pembangunan berbagai jenis industri yang mempunyai kaitan erat satu sama lain secara serentak, sehingga setiap industri akan memperoleh eksternalitas ekonomi sebagai akibat dari industrialisasi, misalkan pengangguran di sektor pertanian (*disguised unemployment*) dipekerjakan dalam suatu industri, produksi suatu industri tersebut meningkat, pendapatan pekerja bertambah, sebagian dibelanjakan untuk membeli berbagai barang hasil produksi industri lain dan sebagian sisanya digunakan untuk membeli bahan makanan hasil sektor pertanian, produksi industri industri secara luas meningkat. Di samping itu, produksi sektor pertanian meningkat pula, maka terjadi pembangunan yang

seimbang meliputi sektor industri dan sektor pertanian (Adisasmita,2013; Perkin, et al, 2001).

Pendapat Nurkse tidak banyak berbeda dengan Rosenstein-Rodan dalam mengemukakan alasan tentang perlunya melaksanakan program pembangunan seimbang dalam pembangunan ekonomi bukan hanya menghadapi kesuksesan dalam memperoleh modal yang diperlukan tetapi juga dalam mendapatkan pasaran untuk barang-barang yang dihasilkan oleh berbagai industri yang akan dikembangkan. Penanaman modal sangat rendah karena rendahnya pendapatan riil masyarakat, yang disebabkan oleh rendahnya produktivitas, dapat dikatakan bahwa dorongan untuk melakukan penanaman modal dibatasi oleh luasnya pasar. Faktor yang terpenting yang menentukan luasnya pasar adalah tingkat produktivitas (Adiasmitha,2013).

Berbeda dengan teori pertumbuhan seimbang, teori pertumbuhan tidak seimbang menyatakan bahwa tidak ada negara yang memiliki modal dalam jumlah yang sangat besar untuk melakukan pembangunan di semua sektor. Oleh karena itu, investasi seharusnya dilakukan pada beberapa sektor atau industri yang telah terpilih agar hasilnya cepat berkembang, dan hasil tersebut dapat digunakan untuk membangun sektor-sektor yang lain. Dengan demikian perekonomian secara berangsur-angsur akan tumbuh dan berkembang dari tidak seimbang menuju ke arah pertumbuhan yang seimbang. Ahli ahli ekonomi ini di antaranya C.P. Kindleberge, H.W. Singer dan Albert Hirschman (Jhingan, 2010; Perkin, et al, 2001). Pendukung strategi pertumbuhan tidak seimbang lebih menyukai investasi pada sektor terpilih dari pada investasi secara serentak pada semua sektor ekonomi. Investasi pada sektor terpilih menghasilkan peluang-peluang investasi baru. Hal ini hanya dapat dicapai dengan cara membuat ketidakseimbangan ekonomi dengan sengaja.

Hirschman meringkaskan strategi pembangunan ekonominya dalam ungkapan berikut ini, pembangunan ekonomi secara khas berjalan menurut lintasan pertumbuhan tak berimbang bahwa keseimbangan pulih sebagai akibat dari tekanan, rangsangan dan paksaan; bahwa lintasan efisien ke arah pembangunan ekonomi mungkin agak tak teratur dan dipenuhi dengan kemacetan dan kekurangan keterampilan, fasilitas, jasa dan produksi; bahwa pembangunan industri akan berlanjut sebagian besar melalui kaitan mundur yakni dari industri terakhir ke industri menengah dan industri dasar.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *descriptive research* yang bermaksud untuk menganalisis potensi ekonomi secara sektoral di wilayah *Tellungpocco'e* (Kabupaten Bone, Soppeng, dan Wajo) propinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi dari berbagai instansi pemerintah diantaranya Badan Pusat Statistic Propinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan laju pertumbuhan dan tingkat pendapatan perkapita masing masing kabupaten pada tahun 2003-2013. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan *descriptive quantitative* dengan alat analisis yaitu tipologi Klassen. Dimana Analisis Tipologi Klassen menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut (Sjafrizal, 2008):

**Gambar 1.** Pengelompokan Sektor Sektor Ekonomi berdasarkan Tipologi Klassen

<b>Kuadran I</b> Sektor, subsektor Andalan	<b>Kuadran II</b> Sektor, subsektor yang Potensial
<b>Kuadran III</b> Sektor, subsektor yang dapat berkembang	<b>Kuadran IV</b> Sektor, subsektor yang relatif tertinggal

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tipologi Klassen merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional yang dapat digunakan untuk mengetahui Klasifikasi sektor perekonomian di Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo. Analisis Tipologi Klassen digunakan dengan tujuan mengidentifikasi posisi sektor perekonomian Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo dengan memperhatikan sektor perekonomian provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi wilayah refrensi. Sebagaimana yang telah di jelaskan bahwa analisis Tipologi Klassen mengklasifikasi sektor ekonomi kedalam empat Klasifikasi yaitu, kuadran I (*Developed Sector*), kuadran II (*Stagnant Sector*), kuadran III (*Developing Sector*) dan kuadran IV (*Undeveloped Sector*).

### Klasifikasi Sektor Ekonomi Kabupaten Bone

Pada Kabupaten Bone dari kesembilan sektor ekonomi sebagian besar berada pada kuadran IV hal ini dapat kita lihat berdasarkan pada gambar 2 adapun

Klasifikasi sektor ekonomi kabupaten Bone berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen adalah sebagai berikut :

1. Sektor, subsektor Andalan (kuadran I)

Pada kuadran ini terdapat dua sektor ekonomi yang dimiliki Kabupaten Bone yaitu sektor pertanian dan bangunan, dimana pada sektor pertanian dan bangunan memiliki pertumbuhan dan kontribusi rata rata tiap sektor lebih besar di bandingkan dengan wilayah yang menjadi referensi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dengan angka pertumbuhan rata rata sektor pertanian Kabupaten Bone sebesar 4,42 dan kontribusi rata rata 52,48 sedangkan angka pertumbuhan rata rata sektor pertanian di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,33 dan kontribusi rata ratanya 28,63. Untuk sektor bangunan pertumbuhan rata rata mencapai nilai 14,77 dan jumlah kontribusi rata rata 6,48 angka ini lebih besar dari pada nilai pertumbuhan dan kontribusi rata rata Provinsi Sulawesi Selatan, dengan nilai pertumbuhan rata rata 10,66 dan kontribusi rata rata 5,31.

2. Sektor, subsektor yang Potensial (kuadran II)

Pada kuadran ini ada satu sektor ekonomi yang dimiliki Kabupaten Bone yang berada pada kuadran ini yaitu sektor jasa jasa. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB Kabupaten Bone yang pertumbuhan rata ratanya kecil 5,53 dibanding dengan pertumbuhan rata rata sektor ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan 5,62, akan tetapi memiliki kontribusi lebih besar di bandingkan dengan kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB provinsi Sulawesi Selatan yaitu, 52,48 : 28,63.

3. Sektor, subsektor yang dapat berkembang (kuadran III)

Sama halnya dengan kuadran II, pada kuadran ini hanya ditempati satu sektor ekonomi Kabupaten Bone yaitu sektor pertambangan dan penggalan. Pertumbuhan rata rata sektor pertambangan dan penggalan Kabupaten Bone sebesar 12,57% dan yang lebih besar dibandingkan dengan nilai pertumbuhan rata rata sektor tersebut di tingkat Sulawesi Selatan yaitu 4,34% sedangkan kontribusi rata rata sektor pertambangan dan penggalan Kabupaten Bone lebih kecil 0,54% di bandingkan Provinsi Sulawesi Selatan 8,72%.

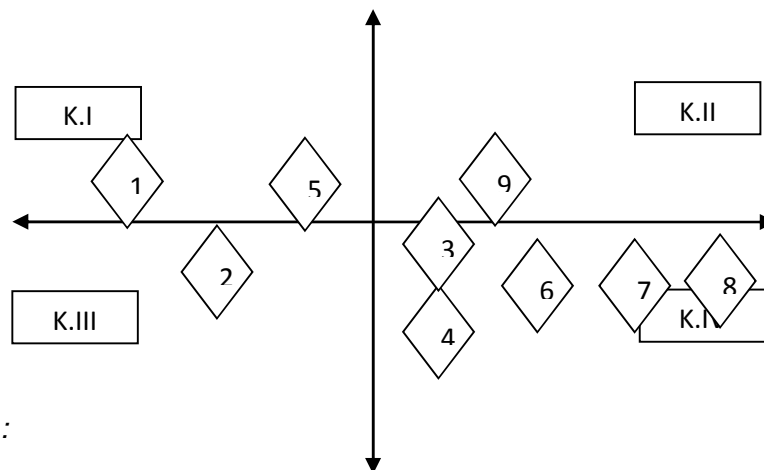


#### 4. Sektor relatif tertinggal (kuadran IV)

Dalam kuadran ini sebagian besar sektor ekonomi Kabupaten Bone berada dalam kategori relative tertinggal. Dari kesembilan sektor ekonomi yang dimiliki kabupaten Bone 5 diantaranya berada pada kuadran ini yaitu sektor industri pengolahan, listrik gas & air bersih, perdagangan hotel & restoran, pengangkutan dan komunikasi, dan yang terakhir keuangan persewaan & jasa perusahaan. Tentu hal ini dilihat dari pertumbuhan dan kontribusi rata-rata sektor-sektor tersebut lebih kecil dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi wilayah referensi.

Pada sektor industri pengolahan pertumbuhan rata-ratanya sebesar 5,08 dan kontribusinya (8,89), sektor listrik gas & air bersih pertumbuhan rata-ratanya (7,24) kontribusi rata-rata (0,76), sektor perdagangan hotel & restoran dari rata-rata pertumbuhannya sebesar (6,76) kontribusinya (8,83), sektor pengangkutan dan komunikasi nilai pertumbuhan rata-ratanya sebesar (8,89) kontribusi rata-ratanya (5,35), dan untuk sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan pertumbuhan rata-ratanya sebesar (14,05) dan kontribusi rata-ratanya (5,42).

**Gambar 2. Klasifikasi Sektor Ekonomi Kabupaten Bone (Tipologi Klassen)**



*Keterangan :*

- 1 : Sektor Pertanian
- 2 : Sektor Pertambangan Dan Penggalian
- 3 : Sektor Industri Pengolahan
- 4 : Sektor Listrik Gas Dan Air Bersih
- 5 : Sektor Bangunan
- 6 : Sektor Perdagangan Hotel & Restoran
- 7 : Sektor Pengangkutan & Komunikasi
- 8 : Sektor Keuangan Persewaan & Jasa Perusahaan
- 9 : Sektor Jasa-Jasa

## **Klasifikasi Sektor Ekonomi Kabupaten Soppeng (Tipologi Klassen)**

Klasifikasi sektor ekonomi Kabupaten Soppeng berdasarkan hasil analisis Topologi Klassen dengan perbandingan antara pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Ekonomi Kabupaten Soppeng dengan pertumbuhan dan Kontribusi rata rata Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi wilayah referensi maka dapat dilihat bahwa dari empat kuadran, kuadran III merupakan kuadran yang banyak sektor berada di kuadran tersebut, dan pada kuadran I (developed sector) hanya ada satu sektor yang dikategorikan sebagai sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat. Dengan melihat gambaran tentang hasil analisis Tipologi Klassen terhadap Klasifikasi Sektor Ekonomi Kabupaten Soppeng maka dapat dijelaskan bahwa klasifikasi sektor ekonomi Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut:

### **1. Sektor, subsektor Andalan (kuadran I)**

Pada kuadran ini hanya satu sektor ekonomi yang dimiliki Kabupaten Soppeng yaitu sektor jasa jasa yang memiliki pertumbuhan rata rata sebesar (6,81) dan kontribusi rata rata (16,14) sedangkan pada wilayah referensi dalam hal ini Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya memiliki nilai rata rata pertumbuhan sektor jasa jasa (5,62) dan kontribusi rata rata (10,89). Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan dan kontribusi rata rata sektor jasa jasa Kabupaten Soppeng lebih besar di bandingkan pertumbuhan dan kontribusi rata rata sektor jasa jasa Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut menjadikan sektor jasa jasa Kabupaten Soppeng merupakan sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat dan berada pada kuadran I.

### **2. Sektor, subsektor yang Potensial (kuadran II)**

Pada kuadran ini ada dua sektor ekonomi yang dimiliki Kabupaten Soppeng yang berada pada kuadran ini yaitu sektor pertanian dan sektor bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan sektor pertanian dan sektor bangunan dalam PDRB Kabupaten Soppeng yang Pertumbuhan rata ratanya kecil dimana pada sektor pertanian (3,75) dan sektor bangunan (10,28), dibanding dengan pertumbuhan rata rata sektor tersebut di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang pada sektor pertanian (3,99) dan sektor bangunan (10,66), akan tetapi memiliki kontribusi lebih besar di bandingkan dengan kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB provinsi Sulawesi Selatan yaitu, sektor pertanian (46,25)

dan sektor bangunan (10,56), sedangkan pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sektor pertanian (28,63), dan sektor bangunan (5,31).

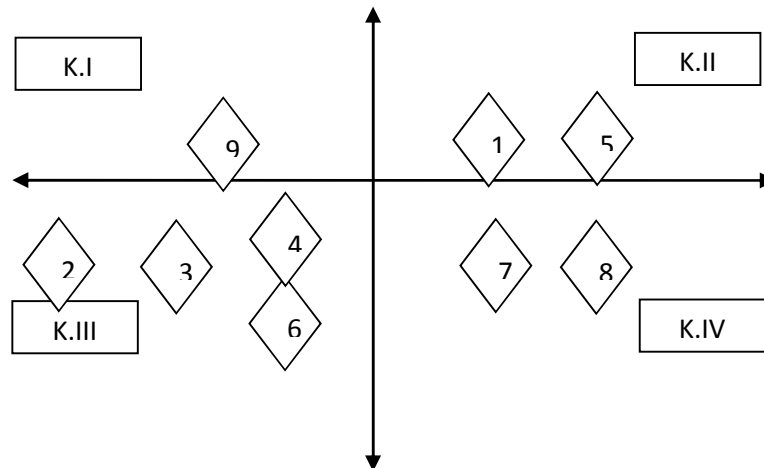
### 3. Sektor, subsektor yang dapat berkembang (kuadran III)

Pada kuadran ini hanya ada empat sektor ekonomi Kabupaten Soppeng yang berada pada kategori sektor Developing Sector di antaranya sektor pertambangan dan penggalian dengan pertumbuhan rata ratanya (8,17) dan kontribusi rata ratanya (0,56), sektor industri pengolahan dengan nilai pertumbuhan rata ratanya (6,60) dan kontribusi rata ratanya (7,51), sektor listrik gas & air bersih dengan pertumbuhan rata rata (8,41) dan kontribusi rata ratanya (0,82), adapun sektor yang terakhir yang berada di kuadran ini yaitu sektor perdagangan hotel dan restoran dengan nilai Pertumbuhan rata rata (10,82) dan kontribusi rata ratanya (10,56), sedangkan pertumbuhan rata rata dan kontribusi rata rata sektor tersebut pada wilayah referensi dalam hal ini Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada sektor pertambangan dan penggalian pertumbuhan rata rata (4,34) dan kontribusi rata ratanya (8,72), sektor industri pengolahan pertumbuhan rata ratanya (6,47) dan kontribusi rata ratanya (13,68), sektor listrik gas & air bersih dengan nilai pertumbuhan rata rata (8,15) dan kontribusi rata rata (1,02), dan yang terakhir adalah sektor perdagangan hotel dan restoran dengan pertumbuhan rata rata (8,98) dan kontribusi rata rata (16,21).

### 4. Sektor relatif tertinggal (kuadran IV)

Beda halnya dengan Kabupaten Bone dalam kuadran ini hanya ada dua sektor ekonomi Kabupaten Soppeng berada dalam kategori relative tertinggal. Sektor tersebut yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi dengan nilai pertumbuhan rata rata (7,77) dan kontribusi rata ratanya (5,88) dibandingkan pertumbuhan pada wilayah referensi sebesar (10,68) dan nilai kontribusi rata ratanya (16,21), adapun sektor selanjutnya yaitu sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan dengan nilai pertumbuhan rata rata pada Kabupaten Soppeng yaitu (10,41) dan kontribusi rata ratanya (5,85), sedangkan pertumbuhan rata rata di Provinsi Sulawesi Selatan (14,17) dan dengan nilai kontribusi sebesar (6,96).

**Gambar 3. Klasifikasi Sektor Ekonomi Kabupaten Soppeng (Tipologi Klassen)**



*Keterangan :*

- 1 : Sektor Pertanian
- 2 : Sektor Pertambangan Dan Penggalian
- 3 : Sektor Industri Pengolahan
- 4 : Sektor Listrik Gas Dan Air Bersih
- 5 : Sektor Bangunan
- 6 : Sektor Perdagangan Hotel & Restoran
- 7 : Sektor Pengangkutan & Komunikasi
- 8 : Sektor Keuangan Persewaan & Jasa Perusahaan
- 9 : Sektor Jasa-Jasa

**Klasifikasi Sektor Ekonomi Kabupaten Wajo (Tipologi Klassen)**

Dengan melihat perbandingan pertumbuhan dan kontribusi rata rata Kabupaten Wajo dengan Provinsi Sulawesi Selatan terlihat pada kuadran I dan II masing masing hanya ada satu sektor yang berada dalam kuadran tersebut sedangkan terlihat pada kuadran IV ada empat sektor ekonomi yang di kategorikan sektor relatif tertinggal (*Underserved Sector*).

1. Sektor, subsektor Andalan (kuadran I)

Sama halnya dengan Kabupaten Soppeng, pada kuadran ini hanya ada satu sektor ekonomi yang dimiliki kabupaten wajo yaitu sektor pertanian yang memiliki pertumbuhan rata rata sebesar (5,33) dan kontribusi rata rata (41,33) sedangkan pada wilayah refrensi dalam hal ini Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya memiliki nilai rata rata pertumbuhan sektor pertanian (3,99) dan kontribusi rata rata (28,63) Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan dan kontribusi rata rata sektor pertanian Kabupaten Wajo lebih besar di bandingkan pertumbuhan dan

kontribusi rata rata sektor pertanian Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut menjadikan sektor pertanian Kabupaten Soppeng merupakan sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (*Developed Sector*).

#### 2. Sektor, subsektor yang Potensial (kuadran II)

Pada kuadran ini hanya ada satu sektor ekonomi yang dimiliki Kabupaten Wajo yang berada pada kuadran ini yaitu sektor perdagangan Hotel dan restoran. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan hotel dan restoran merupakan sektor yang maju tapi tertekan (*Stagnan Sector*). Laju pertumbuhan rata rata sektor perdagangan hotel dan restoran Kabupaten Wajo sebesar (7,62) dengan nilai kontribusi (21,21), sedangkan pertumbuhan rata rata sektor perdagangan hotel dan restoran Provinsi Sulawesi Selatan yaitu (8,98) dan nilai kontribusi rata ratanya (16,21).

#### 3. Sektor, subsektor yang dapat berkembang (kuadran III)

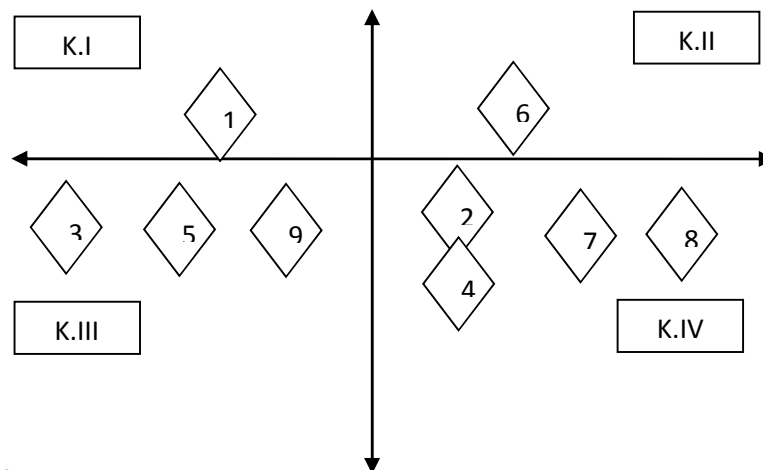
Pada kuadran ini ada tiga sektor ekonomi Kabupaten Wajo yang berada pada kategori sektor *Developing Sector* di antaranya sektor industri pengolahan dengan pertumbuhan rata ratanya (16,84) dan kontribusi rata ratanya (7,8), sektor bangunan dengan nilai pertumbuhan rata ratanya (13,53) dan kontribusi rata ratanya (3,46), dan sektor jasa dengan pertumbuhan rata rata (5,62) dan kontribusi rata ratanya (10,12), sedangkan pertumbuhan rata rata dan kontribusi rata rata sektor tersebut pada wilayah referensi dalam hal ini Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada sektor industri pengolahan pertumbuhan rata ratanya (6,47) dan kontribusi rata ratanya (13,68), sektor bangunan dengan nilai pertumbuhan rata rata (10,66) dan kontribusi rata rata (5,31), dan yang terakhir adalah sektor jasa dengan pertumbuhan rata rata (5,62) dan kontribusi rata rata (10,89).

#### 4. Sektor relatif tertinggal (kuadran IV)

Kabupaten Wajo juga memiliki banyak sektor ekonomi yang relatif tertinggal (*Undeveloped Sector*). Ada empat sektor ekonomi Kabupaten Wajo berada pada kuadran IV diantaranya, sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai pertumbuhan rata rata (-0,72) dan kontribusi rata ratanya (5,06), sektor listrik gas & air bersih dengan nilai pertumbuhan rata rata (4,81) dan kontribusi rata rata (0,63), selanjutnya sektor pengangkutan dan komunikasi dengan nilai pertumbuhan rata rata (10,09) dan nilai kontribusinya (5,46), dan

sektor yang terakhir adalah sektor keuangan persewaan & jasa perusahaan dengan nilai pertumbuhan rata rata (13,40), dan nilai kontribusinya (4,93). Dibandingkan dengan Provinsi sulawesi selatan pertumbuhan rata rata sektor pertambangan dan penggalian sebesar (4,34) dan nilai kontribusinya (8,72), sektor listrik gas & air bersih dengan pertumbuhn rata rata (8,15) dan kontriobusi rata ratanya (1,02), sektor pengangkutan dan komunikasi dengan pertumbuhan rata rata (10,68) dan kontribusi rata rata (8,57), dan yang terakhir adalah sektor keuangan persewaan & jasa perusahaan dengan nilai pertumbuhan rata rata (14,17) dengan kontribusi rata rata (6,96).

**Gambar 4. Klasifikasi Sektor Ekonomi Kabupaten Wajo (Tipologi Klassen)**



*Keterangan :*

- 1 : Sektor Pertanian
- 2 : Sekor Pertambangan Dan Penggalian
- 3 : Sektor Industri Pengolahan
- 4 : Sektor Listrik Gas Dan Air Bersih
- 5 : Sektor Bangunan
- 6 : Sektor Perdagangan Hotel & Restauraan
- 7 : Sektor Pengangkutan & Komunikasi
- 8 : Sektor Keuangan Persewaan & Jasa Perusahaan
- 9 : Sektor Jasa-Jasa

Arah kebijakan pembangunan ekonomi di wilayah *Tellingpocco'e*, baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, harus tetap memperhatikan aspek kemampuan fiskal daerah (*constrained budget*). Sesuai dengan konsep dari Hirschman dengan teori pertumbuhan yang tidak seimbang menyarankan agar suatu daerah berinvestasi pada sector yang dikategorikan sebagai sector andalan yang dapat memicu pertumbuhan sector sector yang lain.

Untuk mendorong pembangunan ekonomi wilayah *Tellungpocco'e* pada tahun 2015 pemerintah daerah Kabupaten Bone mengalokasikan anggaran sebesar 12,58 persen atau Rp 210,234 miliar dari jumlah penerimaan daerah yaitu sebesar Rp 1.671,266 miliar untuk belanja modal. Sementara itu, Kabupaten Soppeng mengalokasikan belanja modal sebesar Rp 2,742 miliar atau 0,34 persen dari penerimaan daerah sedangkan Kabupaten Wajo mengalokasikan anggaran daerah untuk belanja modal jauh lebih besar dari keduanya yaitu Rp 394,024 miliar atau 28,21 persen dari total penerimaan. Untuk dapat menerapkan konsep pembangunan seimbang (*balanced development*) yang digagas oleh Ragnar Nurkse (1960), kapasitas fiskal daerah tersebut masih sangat lemah untuk dapat mendukung pembangunan di semua sektor secara bersamaan sehingga peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan perlu dimaksimalkan.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis sektor potensial di Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo dapat terlihat adanya perbedaan sektor andalan di masing-masing daerah tersebut. Meskipun Kabupaten Bone yang pernah ditetapkan sebagai kota administratif (kotif), sektor pertanian masih merupakan sektor andalan daerah ini yang didukung oleh luas wilayah yang relatif cukup luas dibandingkan dengan dua daerah lainnya. Begitu juga halnya dengan sektor bangunan menjadi sektor andalan Kabupaten Bone. Kebutuhan terhadap tempat tinggal dan sarana dan prasarana publik di daerah tersebut relatif sangat tinggi. Hal ini dikuatkan dengan data BPS Sulawesi Selatan tahun 2014 menunjukkan bahwa daerah ini memiliki jumlah penduduk terbesar kedua setelah Kota Makassar.

Hal yang sama juga terlihat pada Kabupaten Wajo, dimana daerah ini dikenal dengan pusat perdagangan sutera, yang memiliki kemampuan fiskal yang relatif sama dengan kabupaten Bone hasil analisis menunjukkan bahwa sektor andalan daerah ini adalah sektor pertanian sedangkan sektor perdagangan dan perhotelan menjadi sektor yang potensial. Sementara itu, Kabupaten Soppeng yang berada di daerah dataran tinggi Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu daerah sentra pertanian berdasarkan hasil analisis mengklasifikasikan sektor jasa sebagai sektor andalan daerah tersebut. Adanya intervensi yang lebih besar dalam hal pelayanan publik dalam bentuk kebijakan daerah setempat dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor-sektor yang lain.

diantaranya sector pertanian dan sector bangunan yang merupakan sector potensial, termasuk juga sector yang memiliki potensi untuk berkembang.

Untuk dapat menciptakan pertumbuhan yang tinggi melalui sector sector andalan tersebut, teori Harrod-Domar menunjukkan pentingnya penggunaan sepenuhnya alat-alat modal dan tingginya tingkat pengeluaran masyarakat. Kemampuan berproduksi pada sector pertanian dan bangunan serta pelayanan public di wilayah *Tellungpocco'e* juga harus diikuti oleh kemampuan mengkonsumsi dari masyarakat setempat. Oleh karena itu, Intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan daerah pada sector sector andalan tersebut juga perlu memperhatikan aspek ketersediaan lapangan kerja baru.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dari masing masing kudaran menunjukan adanya implikasi terhadap kebijakan pembangunan di wilayah Tellungpocco'e dimana penelitian ini menemukan bahwa sector sector yang dapat dikembangkan di masing masing kabupaten adalah sector pertanian dan bangunan di Kabupaten Bone, sector jasa jasa di Kabupaten Soppeng dan sector pertanian di Kabupaten Wajo dengan menetapkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah merupakan sasaran utama pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan daerah perlu memperhatikan aspek ketersediaan fiscal dan pelibatan peran serta swasta dan masyarakat dalam proses pembangunan daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2005. *Dasar Dasar Ekonomi Wilayah*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Arsyad, Lincolin 1999. *Ekonomi Pembangunan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara*, Jakarta
- Aritenang, A.F. 2008. *A Study on Indonesia Regions Disparity: Post Decentralization*. MPRA Paper No. 25245, posted 21. September 2010 20:26 UTC (serial online). Available from: URL HYPERLINK [https://mpra.ub.uni-muenchen.de/25245/1/MPRA\\_paper\\_25245.pdf](https://mpra.ub.uni-muenchen.de/25245/1/MPRA_paper_25245.pdf)
- Aprisal. 2016. *Analisis sector ekonomi Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo tahun 2003-2013* (Skripsi). Universitas Negeri Makassar: Makassar
- Jhingan, M. L.. 2001, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*, Rajawali Pers: Jakarta
- Perkin, D. *et al.* 2001, *Economics of Development, Fifth Edition*, Norton: United State of America
- Hadi, D.W. & Kusuma, G. 2012. *Propoganda Orde Baru 1966-1998*. Verleden, Vol. 1, No. 1 Bulan Desember 2012: hal 41-50 (serial online). Available from: URL: HYPERLINK <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers>
- Hakim, A. & Giovani, G. 2012. *Perbandingan ekonomi dari masa Sokarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono (1945-2009)*. Ekonomika-Bisnis Vol. 03 No.2 Bulan Juli Tahun 2012, hal 161-180 (serial online). Available from: ULR HYPERLINK <http://download.portalgaruda.org/article.php>
- Rahman, Abdul. 2009. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Provinsi Sulawesi Selatan*. Universitas Hasanuddin. Makassar
- Sjafrisal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. PT. Raja Prasindo Persada, Jakarta